



Judul : Senayan bentuk panitia khusus,jemaah haji berhak dapat layanan terbaik dari negara
Tanggal : Kamis, 18 Juli 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Senayan Bentuk Panitia Khusus

Jemaah Haji Berhak Dapat Layanan Terbaik Dari Negara

Jemaah haji Indonesia berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari negara ketika melaksanakan haji ke Arab Saudi. Apalagi dalam berhaji, jemaah membayar biaya cukup mahal dan harus antre lama agar bisa menunaikan rukun Islam kelima ini.

HAL itu diungkapkan anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah dan menjadi latar belakang terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Haji Angket Pengawasan Haji. Apalagi Tim Penawas (Timwas) Haji DPR

meneukan banyak masalah berulang dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji tahun ini.

Luluk menjelaskan, Senayan selalu mengevaluasi penyelenggaraan haji melalui Panitia Kerja (Panja) di Komisi VIII. Kemudian ada juga Timwas Haji yang berada di lapangan atau di Arab Saudi.

Dari pemantauan itu, kemudian diberikan rekomendasi atas penyelenggaran haji.

"Namun ternyata tidak diikuti

meneukan banyak masalah berulang dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji tahun ini.

Luluk menjelaskan, Senayan selalu mengevaluasi penyelenggaraan haji melalui Panitia Kerja (Panja) di Komisi VIII. Kemudian ada juga Timwas Haji yang berada di lapangan atau di Arab Saudi.

Dari pemantauan itu, kemudian diberikan rekomendasi atas penyelenggaran haji.

"Namun ternyata tidak diikuti

dengan perubahan sikap atau tindakan," kata Luluk, Rabu (17/7/2024).

Karena itu, dia menanyakan apakah Pemerintah serius memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji. Sebal-

problem haji ini terus-menerus berulang tanpa ada perbaikan. Atas dasar itu, Timwas Haji segerak agar problem haji ini dikupas tuntas lewat Hak Angket.

DPR menganggap, masalah pelayanan haji ini sudah masuk kategori genting.

"Jemaah haji sebagai warga negara harus dilindungi hak-haknya. Karena haji itu tidak gratis, haji itu bayar dengan jumlah tidak sedikit. Mereka berhak mendapatkan *the best*

problem haji ini terus-menerus berulang tanpa ada perbaikan. Atas dasar itu, Timwas Haji segerak agar problem haji ini dikupas tuntas lewat Hak Angket.

DPR menganggap, masalah pelayanan haji ini sudah masuk kategori genting.

"Jemaah haji sebagai warga negara harus dilindungi hak-haknya. Karena haji itu tidak gratis, haji itu bayar dengan jumlah tidak sedikit. Mereka berhak mendapatkan *the best*

services dari penyelenggara haji ini, dalam hal ini dari Pemerintah," sebutnya.

Anggota Fraksi PKB ini mengatakan, manajemen haji sejatinya harus dikelola dengan serius. Apalagi Indonesia ini merupakan role model pelaksanaan haji mengingat Indonesia merupakan muslim terbesar di dunia. Mengacu pada anggapan itu, maka sudah sepantasnya pelaksanaan haji ini harus diadukun agar sukses. "Kalau sus-

ses kan tentu akan *credit point* yang baik untuk Pemerintah," ujarnya.

Begitupun sebaliknya. Kalau haji ini bermasalah akibat manajemen yang tidak profesional, layanan yang tidak sepenuh hati, maka tentu bisa merendahkan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya Pemerintah.

"Itu akan melukai para calon jemaah haji dan juga jemaah haji yang sudah berangkat," sambungnya.

ses kan tentu akan *credit point* yang baik untuk Pemerintah," ujarnya.

Begitupun sebaliknya. Kalau haji ini bermasalah akibat manajemen yang tidak profesional, layanan yang tidak sepenuh hati, maka tentu bisa merendahkan seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya Pemerintah.

"Itu akan melukai para calon jemaah haji dan juga jemaah haji yang sudah berangkat," sambungnya.

Berangkat dari itu, kata Luluk, maka semua aspek penyelenggaraan harus mengantut prinsip-prinsip *good governance*, akuntabilitas, transparansi, hingga pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji. "Kita melakukan pengawasan juga nggak main-main," tandasnya.

Luluk lalu mengungkap berbagai temuan Timwas Haji di beberapa spot-spot penting khusus di masa puncak haji di Ar-Rafah, Muzdalifah, dan Mina

atau Armuzna. Temuan tersebut, antara lain penerbangan haji yang mengalami delay sangat panjang, bus selama di Mekah tidak maksimal layanannya. Padahal Pemerintah telah menyewa bus cukup banyak untuk antar jemput para jemaah selama berhaji.

"Bus yang disewa oleh Pemerintah katanya ada 535 bus shalawat. Kemudian kita cek kondisinya, ternyata dari 535 bus itu hanya 20 yang masuk

atau Armuzna. Temuan tersebut, antara lain penerbangan haji yang mengalami delay sangat panjang, bus selama di Mekah tidak maksimal layanannya. Padahal Pemerintah telah menyewa bus cukup banyak untuk antar jemput para jemaah selama berhaji.

"Bus yang disewa oleh Pemerintah katanya ada 535 bus shalawat. Kemudian kita cek kondisinya, ternyata dari 535 bus itu hanya 20 yang masuk

kategori layak untuk ramah lansia," ungkapnya.

Padahal, motto haji tahun ini adalah ramah lansia. Namun ternyata, yang ramah lansia jumlahnya sangat sedikit, yakni 20 bus. Persoalan bus ini pula yang perlu juga didalamnya terkait dengan kesesuaian biaya sewa bus di Arab Saudi.

Persoalan berikutnya, lanjut dia, soal katering. Cukup banyak keluhan terkait dengan layanan makanan makannya jemaah ini. Padahal,

Pemerintah dengan Panja Haji DPR telah menyetujui bahwa untuk sarapan jemaah haji itu 10,5 real, makan siang dan makan malam masing-masing 16,5 hingga 16,7 real.

Dia juga mempersoalkan pelayanan di Armuzna yang tidak mengalami perubahan alias tidak membaik.

"Jika pelayanan di Armuzna tetap begitu-begitu saja, lantas fungsi Pemerintah dalam pelayanan haji apa," ucapnya. ■ KAL

Pemerintah dengan Panja Haji DPR telah menyetujui bahwa untuk sarapan jemaah haji itu 10,5 real, makan siang dan makan malam masing-masing 16,5 hingga 16,7 real.

Dia juga mempersoalkan pelayanan di Armuzna yang tidak mengalami perubahan alias tidak membaik.

"Jika pelayanan di Armuzna tetap begitu-begitu saja, lantas fungsi Pemerintah dalam pelayanan haji apa," ucapnya. ■ KAL